GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**: Suara Pembaruan**	**Tgl/Bln/Thn**	**: 8/3/2005**
Subyek	**:**	**Hari**	**: Selasa**
Kata Kunci	**:**	**Halaman**	**: 15**

Menneg LH Pimpin Tim Pengembalian Limbah B3

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) mengembalikan (reekspor) 1.149, 4 ton bahan berbahaya beracun (B3) yang diimpor dari Singapura, Selasa (8/3). Pengembalian B3 itu akan dipimpin langsung oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH), Rachmat Witoelar, yang juga menjadi President of United Nations Environment Programme (UNEP).

Hingga pagi ini, persiapan keberangkatan ke tempat limbah B3 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, dilakukan oleh tim pengembalian itu di Kantor KLH Jakarta. Tim yang beranggotakan sejumlah deputi menteri juga melibatkan pihak kejaksaan dan kepolisian. Keberangkatan tim yang dipimpin oleh Menneg LH ini diharapkan dapat menuntaskan masalah limbah B3 asal Singapura yang berada di Pulau Galang, Batam. Keberadaan limbah itu sudah sejak bulan Juni 2004 dan meresahkan masyarakat serta mengancam lingkungan.

Menurut Deputi Menneg LH Bidang Pengendalian Dampak Sumber Institusi KLH Isa Karmisa Ardiputra, keberangkatan tim itu juga ingin menekan pihak Singapura agar tidak mengekspor limbah ke Indonesia karena peristiwa ini tidak hanya terjadi sekali ini saja. Sementara itu, saat berlangsung rapat kerja antara Menneg LH, Departemen Perdagangan, Ditjen Bea Cukai, Walikota Batam, dan PT APEL, perusahaan yang menerima ekspor dari Singapura, dengan Komisi VII DPR RI, Senin (7/3) kemarin, pemerintah didesak segera menuntaskan masalah limbah B3 asal Singapura itu. DPR sendiri berencana akan membentuk panitia kerja yang khusus menangani pengembalian limbah asal Singapura itu, karena pengembalian limbah itu dianggap berlarut-larut dan sudah mengancam lingkungan di sekitar lokasi penimbunan. Dalam rapat dengan DPR itu juga diketahui ada indikasi kecurangan dalam urusan perizinan, sehingga limbah itu bisa masuk ke Indonesia. Namun sejumlah pihak yang terkait, seperti Walikota Batam, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Hubungan Luar Negeri Departemen Perdagangan menyanggah pernyataan itu.

PT Asia Pacific Eco Lestari (APEL) yang mengimpor bahan limbah itu juga tidak bisa menjelaskan persoalan tersebut karena perwakilan dari perusahaan itu diminta keluar oleh anggota Komisi VII DPR. Pasalnya yang menghadiri rapat itu adalah *managing director*-nya, Cyprus A Tatali, bukan Komisaris PT APEL yang dijabat Setya Novanto (anggota DPR dari Partai Golkar), Direktur Utama Irawan Darsono, atau Direktur Rudy Alfonso dan Ong Gin Keat.

Lambannya pengembalian B3 kepada pihak Singapura terjadi karena menurut Pemerintah Singapura melalui lembaga lingkungan hidupnya, NEA, bahan itu tidak termasuk limbah. Setiap negara memang memiliki kualifikasi tentang limbah sendiri-sendiri, namun Konvensi Basel yang mengatur tentang hal ini sudah mengatur bahwa negara asal yang mengirim bahan itu harus mau menerima kembali jika di negara penerima bahan itu dikategorikan sebagai limbah. Seperti diketahui, sebuah perusahaan pengimpor pupuk Indonesia mengimpor pupuk dari Singapura yang kemudian ditimbun di Pulau Galang. Pupuk yang diimpor oleh PT APEL terbungkus dalam kantong-kantong sebanyak 1.762 buah dan memiliki bobot 1.149,4 ton. Berdasarkan hasil analisis laboratorium Sucofindo dan ALS Indonesia ternyata material pupuk organik itu terkontaminasi oleh limbah B3 dengan konsentrasi logam berat yang cukup tinggi. Material organik itu mengandung mengandung arsen (As), Barium (Ba), Kadmium (Cd), Kromium (Cr), Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Perak (Ag), dan Seng (Zn). Selain itu materil organik yang berwujud pupuk itu juga mengandung bahan radioaktif, seperti Radium 228 dan Radium 226.

Bahan-bahan beracun itu disimpan di sebuah gudang penimbunan di daerah Jembatan 6, Kecamatan Galang Baru, Batam. Menurut Rachmat, limbah-limbah itu harus segera ditangani agar tidak meresap ke pantai karena letaknya yang berdekatan dengan pantai.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP